SKEMA PAJAK KENDARAAN MEWAH DIROMBAK

Pemerintah segera merelaksasi ketentuan perpajakan bagi kendaraan bermotor roda empat, salah satunya dengan memberikan tarif PPnBM 0% bagi kendaraan listrik.

ISTIMEWA

ILUSTRASI

SRI MULYANI INDRAWATI

Jakarta, HanTer - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati merencanakan untuk mengubah skema pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor, di antaranya tidak ada lagi pembedaan antara sedan dan nonsedan, serta pengenaan berdasarkan pengeluaran emisi karbon.

Dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (11/3/2019), Sri Mulyani, menguraikan perubahan skema itu adalah di antaranya dasar pengenaan pajak yang asalnya berdasarkan kapasitas mesin, menjadi berdasarkan konsumsi bahan bakar dan tingkat pembuangan emisi karbon dioksida (C02).

"Semakin rendah pembuangan emisi maka akan semakin rendah tarif pajaknya," kata Sri Mulyani.

Kemudian, pengelompokan kapasitas mesin kendaraan tidak akan lagi berdasarkan mesin yang menggunakan jenis bahan bakar seperti minyak dan gas. Jika skema baru ini ditetapkan, pengelompokan mesin hanya akan menjadi kelompok kurang dari atau sama dengan 3.000 cc dan di atas 3.000 cc saja.

Sedangkan pengelompokan tipe kendaraan yang asalnya dibedakan antara sedan dan nonsedan, menjadi tidak ada pembedaan.

Selanjutnya, untuk program insentif nantinya akan diubah dari sebelumnya hanya untuk Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) saja, menjadi untuk KBH2, kendaraan elektrik hybrid (hybrid EV/HEV), Kendaraan Plug in HEV, Kendaraan Flexy Engine, dan Kendaraan Listrik,

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menambahkan dalam skema PPnBM yang baru, terdapat insentif fiskal untuk mendorong industrialisasi khususnya untuk produksi mobil listrik.

Pengembangan mobil listrik, kata Airlangga, membutuhkan insentif fiskal karena biaya produksi dan manufaktur mobil listrik yang tinggi. Selain itu, perubahan skema PPnBM termasuk insentif di dalamnya, untuk menurunkan tingkat emisi karbon karena penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia.

"Ada insentif, insentif dalam skema usulan PPnBM yang baru itu bisa mejadi fasilitas fiskal. Jadi (pengenaan PPnbM) berbasis emisi walaupun masih ada kesetaraan terhadap kategori cc," ujarnya.

Skema baru PPnBM ini, menurut Sri Mulyani dan Airlangga, baru akan diterapkan pada 2021. Pemerintah merasa perlu memberikan waktu yang cukup kepada industri untuk melakukan transisi, agar tidak mengganggu ekspansi usaha.

■ **Danial/Ant**

TERDAMPAK BENCANA

Catat! Janji Kementan Beri Bantuan Ganti Rugi Petani

ISTIMEWA

SYUKUR ISWANTORO

Jakarta, HanTer - Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin penyediaan bantuan ganti kerugian bagi petani yang mengalami gagal panen akibat terdampak bencana selama berlangsungnya cuaca ekstrem di berbagai wilayah di Indonesia.

"Pemerintah saat ini sudah memberikan jaminan kepada para petani karena masalah bencana alam ini tentu tidak bisa dihindari," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Syukur Iswantoro, Senin (11/3/2019).

Menurut Syukur, pemerintah akan memberikan ganti rugi berupa subsidi dalam skema program asuransi yang telah diikuti para petani tanaman pangan maupun peternakan. "Jangan khawatir pemerintah akan memberikan ganti terhadap pengeluaran yang mereka keluarkan selama ini," kata dia.

Kendati tidak menyebutkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk membantu para petani terdampak bencana, Syukur meyakini dana yang ada di Kementan mencukupi untuk menutup kebutuhan para petani yang telah terdaftar dalam program asuransi tersebut.

"Kami mengharapkan ke depan semakin banyak lagi petani yang terlibat dalam asuransi terutama petani tanaman pangan karena pemerintah memberikan subsidi untuk itu. Persyarannya gampang, jika kesulitan lapor ke Kementan," kata dia, dilansir Ant.

Mengenai berapa luasan lahan pertanian yang terdampak banjir, ia mengaku belum memiliki data pasti. Meski demikian, Syukur memperkirakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dampaknya lebih kecil.

"Pemerintah sudah siap untuk mengantisipasi itu, jadi jangan khawatir pangan kita tetap cukup, petani kita tetap sejahtera untuk terus bertani," kata dia.

■ **Safari**

BI: Penjualan Eceran Januari 2019 Tumbuh 7,2 Persen

ISTIMEWA

ILUSTRASI

Jakarta, HanTer - Survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan penjualan eceran tumbuh tinggi pada Januari 2019 seperti tercermin dari indeks penjualan riil (IPR) yang naik 7,2 persen secara tahunan (year on year).

"Meski demikian pertumbuhan penjualan eceran itu lebih rendah dibandingkan Desember 2018, yang sebesar 7,7 persen (yoy)," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman Zainal dikutip dalam keterangannya, Senin (11/3/2019).

Dijelaskan, pertumbuhan penjualan eceran pada Januari 2019 tersebut terutama ditopang peningkatan penjualan subkelompok komoditas sandang serta kelompok komoditas barang budaya dan rekreasi.

Penjualan eceran diprakirakan tumbuh meningkat pada Februari 2019. Hal ini terindikasi dari IPR Februari 2019 yang tumbuh 10,9 persen (yoy), didorong oleh penjualan subkelompok komoditas sandang dan kelompok komoditas barang budaya dan rekreasi.

Peningkatan penjualan tersebut antara lain didorong faktor musiman perayaan Hari Raya Imlek.

Hasil survei juga mengindikasikan penurunan tekanan harga di tingkat pedagang eceran dalam tiga bulan mendatang hingga April 2019.

Indikasi tersebut tercermin dari indeks ekspektasi harga umum (IEH) tiga bulan yang akan datang sebesar 154,3 atau lebih rendah dibandingkan IEH pada bulan sebelumnya sebesar 156,9.

■ **Ant**

Darmin Klaim Pelemahan Ekonomi Global Tak Berdampak ke RI

ISTIMEWA

DARMIN NASUTION

Jakarta, HanTer - Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi & Pembangunan (OECD) memangkas prakiraan pertumbuhan ekonomi global pada 2019 dan 2020, menyusul penurunan proyeksi sebelumnya pada November. OECD memperkirakan dalam laporan sementaranya bahwa ekonomi dunia akan tumbuh 3,3 persen pada 2019 dan 3,4 persen pada 2020.

Meski demikian, pemerintah tetap yakin bahwa proyeksi tersebut tidak akan berdampak cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini masih mampu menembus angka 5,3 persen. Hal ini dikarenakan program-program pembangunan yang mendorong pertumbuhan sedang dalam proses.

"Ekonomi kita kan pertumbuhannya itu masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan proyek-proyek infrastruktur yang sudah dimulai, yang akan jalan saja terus. Beda dengan kalau belum ada investasinya, boleh jadi akan terpengaruh," tutur Darmin di Jakarta, Senin (11/3/2019).

Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah mengebut penyelesaiaan pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan mengingat masa kerja Presiden Joko Widodo yang sudah memasuki tahun terakhir kepemimpinannya.

Selain investasi, Darmin juga yakin konsumsi masyarakat masih akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, angka konsumsi masyarakat terus tumbuh setiap tahunnya. "Sebetulnya terutama konsumsi masyarakat dan investasi (pendorong investasi)," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka konsumsi masyarakat pada 2018 masih tumbuh positif, 5,05 persen. Bahkan, tahun ini pemerintah memproyeksikan angka konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh diatas 5 persen.

Bank Indonesia (BI) sebelumnya optimistis pertumbuhan ekonomi nasional bisa naik 6 persen dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Hal itu bisa diwujudkan asal ada keberlanjutan kebijakan ekonomi.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut, pertumbuhan ekonomi RI saat ini yang stagnan di kisaran 5 persen tidak terlepas dari pengaruh negatif ekonomi global. Namun, dengan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan, dia yakin laju pertumbuhan akan meningkat.

"Optimis pertumbuhan tinggi, rupiah stabil, inflasi rendah, dan pembiayaan ekonomi angkanya seperti ini, di bawah ini stres test risiko. Ke depan, insyaallah 5 tahun ke depan sepanjang ada keberlanjutan ini bisa ke arah 6 persen, ya 4-5 tahun ke depan," kata Perry, dilansir News.

■ **Safari**

PASANG IKLAN DI SINI
-Iklan Kolom -Baris -Display
Hubungi
021 568 3948
0817 774 289

Pengumuman

Tuan Theodorus A. Sugiharto, bertempat tinggal di Jakarta Barat, akan mengambilalih sebanyak 95 (sembilan puluh lima) saham dari PT Crowde Membangun Bangsa, berkedudukan di Jakarta Selatan atau sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari seluruh modal disetor dan ditempatkan dalam PT Mari Kita Membangun Bangsa, berkedudukan di Jakarta Utara ("**Perseroan**"), yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan. Kreditor dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan dalam 14 hari setelah pengumuman ini kepada Direksi Perseroan.

Jakarta, 12 Maret 2019
Direksi
Theodorus A. Sugiharto
PT Mari Kita Membangun Bangsa

PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pembubaran Perseroan Terbatas **PT. THIAM JOO INDONESIA** tanggal 04 Maret 2019, Nomor 9, dibuat dihadapan Madi Widjaya Mihardja, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Serang, pemegang saham Perseroan Terbatas **PT. THIAM JOO INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Pusat, (selanjutnya disebut "Perseroan"), telah memutuskan untuk membubarkan dan melikuidasi Perseroan serta telah menyetujui pengangkatan **Tn. NG JOO SOON** sebagai likuidator Perseroan.

Kepada para pihak yang mempunyai kepentingan atau tagihan terhadap Perseroan, harap segera mengajukan tagihan-tagihannya disertai bukti-bukti yang sah dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada likuidator Perseroan pada alamat : Jl. AM. Sangaji No. 2B, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Likuidator
PT. THIAM JOO INDONESIA

RALAT KETERBUKAAN INFORMASI 11 MARET 2019

Dengan ini kami meralat iklan Keterbukaan Informasi **PT AirAsia Indonesia Tbk.**,yang telah ditayangkan diharian Terbit pada **tanggal 11 Maret 2019.**

SEBELUMNYA :
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di IAA adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham PT Indonesia Airasia, Akta Notaris No. 01 tanggal 09 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Rizki Meuthia S.H., M.Kn.,Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris			Direksi		
Komisaris Utama	:	Pin Harris	Direktur Utama	:	Dendy Kurniawan
Komisaris	:	Kamarudin Bin Meranun	Direktur	:	Wuri Septiawan
Komisaris	:	Muhamad Kerry Adrianto Riza	Direktur	:	Heru Susilo
			Direktur	:	Raden Achmad Sadikin
			Direktur	:	Mikiko Steven
			Direktur	:	Rifai

SEHARUSNYA
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di IAA adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham PT Indonesia Airasia, Akta Notaris No. 04 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Rizki Meuthia S.H., M.Kn.,Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat nomor pemberitahuan AHU-AH.01.03-0113668 tanggal 25 Februari 2019, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris			Direksi		
Komisaris Utama	:	Pin Harris	Direktur Utama	:	Dendy Kurniawan
Komisaris	:	Kamarudin Bin Meranun	Direktur	:	Wuri Septiawan
Komisaris	:	Muhamad Kerry Adrianto Riza	Direktur	:	Heru Susilo
			Direktur	:	Raden Achmad Sadikin
			Direktur	:	Rifai

Jakarta, 12 Maret 2019
PT AirAsia Indonesia Tbk

PENGUMUMAN RENCANA KEGIATAN STUDI AMDAL PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN MENARA BRI

Mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk selaku pemrakarsa, dengan ini mengumumkan rencana kegiatan studi AMDAL Pembangunan Gedung Perkantoran Menara BRI sebagai berikut:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berencana melakukan kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran Menara BRI yang berlokasi di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 64 No. 177A, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dengan memanfaatkan lahan seluas ±8.510 m^2, dengan luas lantai dasar bangunan ±4.229,93 m^2, dan ketinggian bangunan 37 lantai (150 m).
2. Kegiatan pembangunan ini diprakarsai oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu program penyediaan fasilitas perkantoran yang memadai. Diharapkan Pembangunan Gedung Perkantoran Menara BRI ini memberikan dampak positif pada tahap konstruksi maupun operasional terutama dalam menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat, penghijauan yang asri di lingkungan dan ruang terbuka hijau sebagai penunjang kota, dan peningkatan pendapatan pajak serta pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terhitung mulai hari ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku pemrakarsa mengumumkan rencana kegiatan tersebut dan mengharapkan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagai bahan kajian dan telaahan dalam proses penyusunan AMDAL selanjutnya.

SARAN, MASUKAN DAN TANGGAPAN

Dapat disampaikan kepada:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 8082 5090

Dinas Lingkungan H idup Provinsi DKI Jakarta
Alamat : Jalan Mandala V No.67, RT.1/RW.2, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13640
Telp/Fax : (021) 8092744/ (021) 8091056

Batas waktu penyampaian saran, pendapat dan tanggapan:
10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini